



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

**Judul** : RUU Penyelenggaraan Pemilu: Di Balik Polemik Syarat Capres  
**Tanggal** : Senin, 17 Juli 2017  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 4

## RUU PENYELENGGARAAN PEMILU

# Di Balik Polemik Syarat Capres

Tiga jam berlalu, lobi antara fraksi-fraksi di DPR bersama pemerintah untuk membahas lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Kamis (13/7) malam, akhirnya usai. Namun, lobi tertutup yang telah digelar untuk kesehian kalirya dalam satu bulan terakhir itu harus kembali menemui jalan buntu.

**M**asih panas lagi ini Prabowo, Jalan Pemilu 2019. Namun, dia membatah jika hal itu jadi satu-satunya alasan yang mendasari sikap Gerindra tentang ambang batas pencalonan presiden. "Bukan saja mencalonkan agar kami bisa mencalonkan Prabowo. Lebih dari itu, ini permasalahan konstitutionalitas dan membuahkan peluang seluas-luasnya," ujarnya.

Wakil Ketua Panitia RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman pun mengutarakan alasan senada sebagai dasar sikap partainya. Demokrat, sebagaimana Gerindra, juga ingin ambang batas pencalonan prensid ditetapkan.

"Ambang batas itu bisa berlaku kalau pemilu legislatif dan presiden tidak serentak. Kalau kedua keduanya serentak, mungkin menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2019 sebagai acuan ambang batas Pemilu Presiden 2019? Apalagi hasil Pemilu 2014 itu sudah dipakai untuk Pemilu Presiden 2014," ujarnya.

Namun, sejumlah elite parpol anggota pansus menilai sikap Demokrat itu bagian dari strategi memulung jalan Agus Harimurti Hidayah, putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, agar tidak masuk pada 2019.

Pansus ini sebenarnya selaras dengan hasil Rapat Kerja Nasional Partai Demokrat, April lalu. Saat itu, Demokrat memutuskan agar mengusung kaderanya sendiri dalam Pemilu Presiden 2019. Pandangan itu sejalan pula dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermano. "Kader-kader di bawah menginginkan Agus jadi *the next leader* (pemimpin berikutnya) dan maju pada 2019," ujarnya.

### Skap berbeda

Bagaimana dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN)? Informasi yang dihimpun dari sejumlah elite parpol, Ketua Umum PKB Muhammadi Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga ingin maju dalam Pemilu Presiden 2019. Keinginan ini secaraimplikatif pun eksplisit dilontarkan dalam berbagai forum lobi RUU Pemilu 2014. Gerinda memperoleh 73 kursi di DPR atau 13,03 persen dari total 560 kursi DPR.

Riza tidak menampik, Gerindra memang ingin mengusung sikap berbeda. Senada dengan

barisan partai nonpemerintah, PAN ingin ambang batas presiden ditetadakan atau kalau pun ada besarannya hanya 10 atau 15 persen. Sementara PKB ingin besaran ambang batas 10 persen.

Perhitungannya, jika ambang batas ditetadakan, keinginan kedua parpol lebih mudah tercapai. Kalau pun ambang batas 10 atau 15 persen, peluang masih tetap terbuka. Jika tidak untuk posisi capres, setidaknya untuk kursi wakil presiden. Pada 2014, raihan kursi kedua parpol di DPR hanya berselisih 1 persen dengan ambang batas 10 persen.

Namun, ketua pansus dari Fraksi PKB, Lukman Edy, membatah hal ini. Menurut dia, berapa pun besar ambang batasnya, jumlah kursi atauup raihan suara dalam Pemilu 2014 sudah signifikan bagi PKB untuk bisa terlibat aktif pada Pemilu Presiden 2019. "PKB ingin ambang batas diturunkan agar lebih banyak pihak calon pemimpin yang dihadirkan ke publik," katanya.

Zulkifli Hasan mengatakan, untuk sejauh ini dirinya juga belum berencana ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dalam Pemilu 2019 nanti. "Pilpresnya masih jauh, dua tahun lagi. Undang-undangnya saja sekarang belum selesai. Itu urusan nanti

## PARTAI YANG BISA MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILU PRESIDEN 2019

Merujuk pada hasil Pemilu 2014

| OPSI 1  | OPSI 2  | OPSI 3   |
|---|---|--|
| Ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara sah nasional. | Ambang batas pencalonan presiden sebesar 10 persen perolehan kursi atau 15 persen perolehan suara sah nasional. | Menjadikan ambang batas pencalonan presiden atau 0 persen. |
| <b>Pendukung</b>  |   |  |
| PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura<br><br><br><br><br>  | PAN, PKB, Gerindra, PKS<br><br><br><br>   | Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, PKB<br><br><br><br><br>      |

Peluang mengajukan capres-cawapres sendiri di Pemilu Presiden 2019

Diolah oleh AGE/CPA

setelah undang-undangnya selesai," katanya.

Sementara itu, di balik sikap pemerintah bersama lima fraksi pendukungnya (Golkar, PAN, PKB, Gerindra, dan PKS) yang mengusung ambang batas 20-25 persen juga muncul pandangan bahwa itu strategi memulung Joko Widodo agar kembali terpilih pada 2019 untuk periode kedua. "Ada kesan mereka (koalisi pemerintah) ingin meminimalisir kompetisi," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Dengan dukungan 51,7 persen kursi di DPR (jumlah total lima fraksi pendukung pemerintah di DPR) yang mengusung ambang batas 10 persen,

Namun, ketua pansus dari Fraksi PKB, Lukman Edy, membatah hal ini. Menurut dia, berapa pun besar ambang batasnya, jumlah kursi atauup raihan suara dalam Pemilu 2014 sudah signifikan bagi PKB untuk bisa terlibat aktif pada Pemilu Presiden 2019.

"PKB ingin ambang batas diturunkan agar lebih banyak pihak calon pemimpin yang dihadirkan ke publik," katanya.

Zulkifli Hasan mengatakan, untuk sejauh ini dirinya juga belum berencana ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dalam Pemilu 2019 nanti. "Pilpresnya masih jauh, dua tahun lagi. Undang-undangnya saja sekarang belum selesai. Itu urusan nanti

sang. Ruang kompetisi yang terbatas ini membatasi kans Jokowi terpilih kembali pada 2019,"

Tim partai pendukung pun belum sepakat mengikuti. Sebab, dengan keserentakan pemilu, elektabilitas figur yang kuat akan ikut memengaruhi perolehan suara partai.

Ahmad Riza Patria menduga, partai politik pendukung Jokowi lebih berkepentingan mendukung ambang batas 20-25 persen. Sebab, jika ambang batas ditetadakan, Jokowi dapat mencalonkan diri terlepas dari pendukungnya. "Jadi, mereka dengan 20 persen ini, Presiden tersandera partai-partai koalisiinya," ujarnya.

Namun, Johnny membantah hal ini. Menurut dia, ambang batas 20-25 persen bukan untuk kepentingan Jokowi, melainkan siapa pun yang terpilih pada 2019. Sebab, presiden terpilih setidaknya sudah memperoleh jaminan mendapatkan dukungan kuat di DPR. Ini penting untuk pemerintahan yang efektif.

Pemerhati politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiantoro, menilai, pertarungan kepentingan politik di balik perbedaan ambang batas ini mengindikasikan perbedaan sejauh ini bahwa ada momongan pembahasan RUU Pemilu hanya sebatas kepentingan jangka pendek partai politik untuk pemilu 2019.

(AGNES THEODOORA/A PONCO ANGGORO)

INFOGRAFIK: DICKY